

Kinerja **BBPPT 2022**

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi





SDPPI



Laporan Kinerja Tahun 2022
Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

- 7 Ringkasan Eksekutif
- 13 Pengantar Kepala BBPPT

Pendahuluan

- 16 Latar Belakang
- 17 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 18 Potensi Dan Permasalahan Strategis
- 19 Sistematika Pelaporan

Perjanjian Kinerja

- 22 Rencana Strategis 2020-2024
- 23 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja

- 26 Capaian Kinerja Organisasi
 - Sasaran 1. Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK
 - 29 IK-1 Persentase (%) Pengembangan BBPPT Sebagai Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK
 - 31 IK-2 Persentase (%) Pemenuhan Standar Mutu *International Organization for Standardization* (ISO)
 - Sasaran 2. Meningkatkan Daya Saing Dan Penguatan Teknologi Pengujian Melalui Kerjasama Sesuai Standar Internasional
 - 34 IK-3 Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi
 - 36 IK-4 Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur
 - 39 IK-5 Jumlah Kerjasama yang Terjalin Dengan Organisasi Pengujian Perangkat
 - Sasaran 3. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos Dan Informatika BBPPT
 - 41 IK-6 Indeks Integritas Pelayanan Publik (Skala 0 s.d 10)
 - 42 IK-7 Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 0 s.d 4)
 - 43 IK-8 Persentase (%) Pencapaian Target PNPB Biaya Pengujian dan Kalibrasi dari Target yang ditetapkan (Rp. 15.225.853.000)
 - Sasaran 4. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Bbppt Yang Efisien Dan Efektif
 - 45 IK-9 Nilai Kinerja Anggaran BBPPT
 - 47 Kinerja Lainnya
 - 47 Dukungan UMKM Pengujian TV Digital di Solo
 - 49 Penghargaan Reformasi Birokrasi
 - 50 Uji Coba (EWS) Early Warning System
 - 52 Langkah Strategis BBPPT

Penutup

- 56 Penutup

BORNEO LAB
LABORATORIUM "Borneo"



Menjamin Keamanan Dan Keselamatan Penggunaan Perangkat Telekomunikasi

Industri TIK merupakan industri strategis dalam mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, maka industri TIK harus terus dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut menuntut perubahan peran BBPPT yang cenderung semakin strategis. BBPPT sebelumnya dirasakan masih belum optimal dalam memberikan layanan pengujian mengingat hasil pengujian di BBPPT saat ini belum dapat diakui secara internasional, dikarenakan BBPPT belum dapat melakukan pengujian full compliance (belum dapat memenuhi semua item pengujian yang dipersyaratkan berdasarkan standar internasional). Selain itu standar internasional juga mensyaratkan penggunaan chamber untuk pengujian *Radio Frequency* (RF) dan EMC, guna menghilangkan gangguan dari lingkungan sekitar pada saat pengujian, sehingga hasil pengujian yang diperoleh benar-benar valid.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan *Groundbreaking* atau peletakan batu pertama secara simbolis di BBPPT Tapos. Dengan adanya Laboratorium baru nantinya, diharapkan kemampuan yang setara dengan *World Class Testing* yang berstandar global dan memiliki daya saing global, dengan begitu diharapkan juga kedepannya dapat mendorong industri telekomunikasi dalam negeri yang memiliki kualifikasi berstandar internasional tanpa harus melakukan sertifikasi di negara tujuan ekspor.

Pengembangan laboratorium pengujian dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan akan lembaga pengujian yang efektif, suportif, mumpuni dan mendapat pengakuan internasional dalam optimalisasi peran dan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjamin dan melindungi keselamatan seluruh masyarakat dalam menggunakan layanan dan perangkat telekomunikasi. Laboratorium-laboratorium pengujian yang ada saat ini perlu disupervisi oleh laboratorium yang representatif (dalam hal ini adalah BBPPT) untuk melakukan kontrol dan sinkronisasi dari unsur rantai teknologi perangkat telekomunikasi dan informasi sebagai fungsi *protect*, *gate* dan *spectrum management*.

Peran pemerintah adalah menjaga fungsi penataan, pengendalian dan pengelolaan manajemen spektrum frekuensi dari sisi kesesuaian alat/perangkat telekomunikasi, menjadi gerbang industri baik di level nasional maupun internasional. Sedang dari sisi peningkatan industri dalam negeri yakni perlu adanya lembaga pengujian yang memiliki kemampuan menguji alat/perangkat telekomunikasi yang memenuhi standar-standar (*global acceptance*) di beberapa negara tujuan ekspor/pasar internasional/kegiatan ekspor impor/global IoT market/industry 4.0, adanya kerjasama dengan *laboratorium uji lain untuk mendorong pertumbuhan laboratorium uji lokal dan produsen perangkat telekomunikasi dalam negeri. Bagi masyarakat, memberikan manfaat akan adanya jaminan keamanan dan keselamatan dari produk telekomunikasi yang digunakan.

*Laboratorium Uji yang di maksud adalah termasuk laboratorium pengujian, balai uji

BBPPT telah berhasil membuktikan komitmen dalam menerapkan reformasi birokrasi yang sehat dan bersih di wilayah kerja. Diraihnya penghargaan atas prestasi terkait Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 sampai dengan 2022 di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meraih penghargaan atas "Pengelolaan BMN Terbaik Pagu di atas 30 Miliar (Penghargaan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat)" dan peringkat dua "Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik TA 2021", Peringkat 3 "Penerima Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022" Tingkat Kementerian, dan "Realisasi Kartu Kredit Pemerintah Terbesar dibawah Lingkup Satuan Kerja KPPN Bekasi Tahun 2022".

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK	1. Presentase (%) pengembangan BBPPT sebagai laboratorium pusat pengujian perangkat TIK	50%	50%	100
	2. Persentase (%) Pemenuhan standar mutu <i>International Organization for Standardization (ISO)</i>	60%	60%	100
Meningkatnya Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian Melalui Kerjasama Sesuai Standar Internasional	1. Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi	95%	97,42%	102.54
	2. Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur	95%	97,27%	102.39
	3. Jumlah kerjasama yang terjalin dengan organisasi pengujian perangkat	1 Kerjasama	3 Kerjasama	300
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT	1. Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)	8.2	8.95	109.15
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4)	3.50	3.70	105.71
	3. Persentase (%) Pencapaian Target PNBPN Biaya Pengujian dan Kalibrasi dari target yang ditetapkan (Rp. 15.225.853.000)	100%	32.60%	32.60
Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif	1. Nilai Kinerja Anggaran BBPPT	87	83	95.40

Secara umum capaian kinerja BBPPT tercapai, hal ini dapat terlihat dari kenaikan persentase penyelesaian pengujian perangkat telekomunikasi dan kalibrasi alat ukur.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap aplikan telah dilakukan upaya untuk mempermudah penilaian kepuasan pelanggan, pada tahun ini telah dibangun aplikasi e-SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang terintegrasi pada SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian). Berdasarkan hasil survei, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 terhadap pelayanan pengujian di BBPPT meningkat dari 3.6 menjadi 3.7 dengan predikat Sangat Baik.

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi diuraikan di bawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab 3.

Persentase (%) Pengembangan BBPPT Sebagai Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK

Indikator kinerja sasaran strategis 1 “Persentase (%) pengembangan laboratorium pusat pengujian perangkat TIK” pada tahun 2022 memiliki target sebesar 50 persen dan BBPPT mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 50 persen dengan angka capaian sebesar 100 persen.

Berikut proses capaian pada indikator ini:

Terselesaikannya pembangunan konstruksi gedung BBPPT Tapos. Tahun 2022 sampai pada tahap Tahun ke 3 dengan target 50 % pengembangan Laboratorium BBPPT dan Sarana Pendukung, dimulainya dengan konstruksi Gedung yang akan berdiri di atas lahan sebesar 22.723 m², dengan 5 bangunan yang berdesain futuristik dan ramah lingkungan.

Persentase (%) Pemenuhan Standar Mutu *International Organization for Standardization* (ISO)

Indikator kinerja sasaran strategis 2; “Persentase (%) Pemenuhan standar mutu *International Organization for Standardization* (ISO)” Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 100 persen, BBPPT mencapai target 100 persen.

Untuk ISO 17025 BBPPT telah melakukan penambahan 10 (sepuluh) ruang lingkup pengujian yakni: Penerima DVBT2, Penerima DVBS, Radio Maritim, Radio Modem, *Optical Light Terminal* (OLT), *Optical Network Termination* (ONT), IP PBX, IP Phone, *Electrical Safety* dan *Specific Absorption Rate* (SAR). Sedangkan untuk ISO 17043 telah dilakukan penambahan 1 (satu) ruang lingkup Uji Profisiensi untuk Perangkat Radio Komunikasi 2 (dua) arah.

Pada Sasaran Program II “Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian Melalui Kerjasama Sesuai Standar Internasional” terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Indikator kinerja sasaran strategis 4 “Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi” memiliki target sebesar 95%, BBPPT mencapai 97.42% yang mana melebihi target.

Berikut penyelesaian pengujian yang telah diselesaikan dari total permohonan pengujian yang masuk sampai akhir desember 2022 sebanyak 697, yang diselesaikan sebagai Laporan Hasil Uji (LHU) sebanyak 679 atau sebesar 97.42%.

Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur

Indikator kinerja sasaran strategis 5 “Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur” memiliki target sebesar 95%, BBPPT mencapai 97,27%.

Berikut penyelesaian kalibrasi yang telah diselesaikan dari total permohonan kalibrasi yang masuk sampai akhir Desember 2022 sebanyak 183, yang diselesaikan sebagai Laporan Hasil Kalibrasi (LHK) sebanyak 178 atau sebesar 97,27%.

Jumlah Kerjasama yang Terjalin dengan Organisasi Pengujian Perangkat

Indikator kinerja sasaran strategis 6 “Jumlah kerjasama yang terjalin dengan organisasi pengujian perangkat” memiliki target sebesar 1 kerjasama, dan telah tercapai 3 kerjasama atau meningkat 300%.

Pada Sasaran Program III “Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT” terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Telah dilakukan kerjasama dengan PT.Qualis, Politeknik Negeri Semarang dan Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI).

Indeks Integritas Pelayanan Publik

Indikator kinerja sasaran strategis 7 “Indeks integritas pelayanan publik (skala 0 s.d 10)” memiliki target sebesar angka nilai 8.20, BBPPT mencapai nilai 8.95 dengan angka capaian sebesar 109.15 pelaksanaan survei ini berdasarkan parameter yang dikeluarkan oleh KPK.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja sasaran strategis 8 “Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4)” targetnya sebesar 3.50 dan hasil yang dicapai adalah sebesar 3.70 sehingga didapatkan presentasi capaian sebesar 105.71 dari target, hasil ini didapatkan dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Independen LPPM IPB.

Persentase (%) Pencapaian Target PNBP Biaya Pengujian dan Kalibrasi dari Target yang Ditetapkan

Indikator kinerja sasaran strategis 9 “Persentase pencapaian target PNBP Biaya Pengujian dan Kalibrasi dari target yang ditetapkan Rp. 15.225.853.000,-” Capaian PNBP pengujian dan kalibrasi sampai akhir Desember 2022 adalah Rp. 4.989.170.00,- yakni capaian ini turun 67% dari target tahun 2022. Persentase capaian sebesar 32.60% dari target yang ditetapkan.

Pada Sasaran Program IV “Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Nilai Kinerja Anggaran BBPPT

Indikator kinerja sasaran strategis 11 “Nilai kinerja Anggaran BBPPT” target yang ditetapkan sebesar 87, BBPPT mencapai kinerja sebesar 83 sehingga jumlah capaian sebesar 95.4. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari : Nilai SMART dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).





SYAHARUDDIN ST, MT
Kepala BBPPT

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semua. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar sesuai dengan persyaratan teknis.

Tahun 2022 merupakan tahapan konstruksi fisik laboratorium pengujian di Tapos, Depok Jawa Barat. BBPPT bersinergi memberikan kinerja terbaik melalui pembangunan laboratorium uji yang berstandar internasional. Laboratorium uji di Indonesia memiliki fungsi sebagai penjamin mutu perangkat agar aman digunakan oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang pengujian perangkat telekomunikasi dan kalibrasi dapat terlaksana dengan terwujudnya tata kelola pelayanan dan administrasi yang bersih, efisien dan efektif.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) dalam setiap kegiatan di BBPPT telah ditingkatkan secara konsisten dalam aspek administrasi dan substansi. BBPPT menyambut baik dengan mengapresiasi upaya penerapan standar tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan. Upaya untuk menerapkan, mengelola serta memperkuat Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistle-blowing system/WBS*) sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Pengelolaan Pengaduan.

Semua kegiatan pemerintah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai lanjutan perubahan transformasi digital dalam teknologi komunikasi di Indonesia. BBPPT telah melakukan pemetaan pada seluruh fungsi struktural dengan mengubah budaya kerja dan akselerasi kinerja dalam rangka mencapai laboratorium pengujian bertaraf internasional. Pengembangan dan pembangunan laboratorium BBPPT terus diprioritaskan dan diselaraskan dengan isu *Internet of Things (IoT)* yang makin konvergen.

Laporan Kinerja (LAKIN) BBPPT Tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LAKIN ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan BBPPT. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui LAKIN BBPPT tahun 2022, BBPPT melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi, Februari 2023





PENDAHULUAN

- 16 Latar Belakang
- 17 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 18 Potensi dan Permasalahan Strategis
- 19 Sistematika Pelaporan

LATAR BELAKANG

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) menunjukan keandalannya sebagai salah satu ujung tombak dalam pengujian perangkat telekomunikasi di Indonesia. Hal yang patut dipertimbangkan adalah kebutuhan akan meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pengujian alat/perangkat telekomunikasi serta kalibrasi dimasyarakat. Mengingat perkembangan ruang lingkup tugas, beban dan tingkat kompleksitas serta tantangan pekerjaannya semakin meningkat dan luas seiring dengan tingginya akselerasi di industri perangkat telekomunikasi nasional dan internasional.

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) IPTEK yang meningkat. Pesatnya teknologi komunikasi yang mengglobal tetap selaras mengikuti kaidah yang mendasari BBPPT dalam melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Tahun 2022 adalah tahun transformasi digital, langkah perjalanan BBPPT menjadi cikal bakal pintu masuk laboratorium rujukan di masa depan negeri ini. Laboratorium uji perangkat yang perannya melindungi masyarakat dari aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan dalam penggunaan komunikasi yang ramah. Kompetensi BBPPT dengan sigap dapat menghasilkan kualitas hasil uji perangkat telekomunikasi yang mumpuni dimasyarakat secara nasional dan internasional, laboratorium pengujian telekomunikasi ini diharapkan mampu memiliki daya saing yang tinggi.

Selanjutnya, diharapkan BBPPT berkembang menuju ke dekade-dekade berikutnya menjadi balai pengujian yang bertahan, handal, dan tangguh mencapai keberhasilan. Sehingga peran BBPPT dapat lebih besar untuk kebaikan telekomunikasi yang pencapaiannya signifikan. Upaya dan dedikasi ini tidak terlepas dari upaya dan kerja keras seluruh aspek yang ikut bersatu padu baik teknologi, sumber daya manusia, dan kelengkapan alat pengujian terkini demi terciptanya transformasi digital. BBPPT akan terus maju untuk mencapai berbagai keberhasilan dan mampu membawa kesejahteraan yang merata sesuai dengan visi indonesia hebat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BBPPT adalah untuk mengukur kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

00

01

PENDAHULUAN

02

03

04

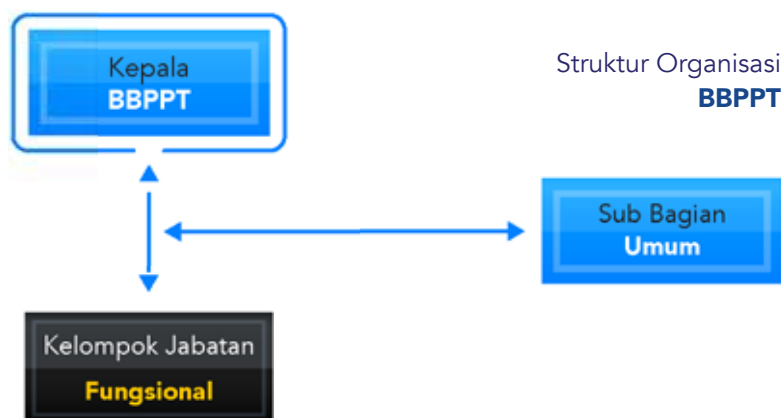
Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
2. Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/atau perangkat telekomunikasi;
3. Pelaksanaan analisa evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
4. Pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi, *electromagnetic compatibility* (EMC), dan kalibrasi; dan
5. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdiri atas :

1. Subbagian Umum;
Mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan sistem dan data informasi, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dari perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia yang semakin meningkat dan dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi secara terus menerus mengembangkan kemampuannya baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Untuk menjamin mutu pengujian dan kompetensi laboratorium yang lebih baik, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2017 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN dan LK-137-IDN sejak tahun 2001.

POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Peran BBPPT ke depan dalam arah tujuan pengembangan Laboratorium yang diwujudkan adalah sebagai:

1. *Protect* :
Melindungi masyarakat dari beredarnya alat/perangkat yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan/ keselamatan. *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection* (ICNIRP) telah mengeluarkan batas maksimal radiasi yang dapat dikeluarkan oleh suatu perangkat karena berpotensi mengganggu kesehatan manusia. Ini artinya BBPPT harus dapat mem-*Protect* rakyat Indonesia dari perangkat yang buruk;
2. *Gate* :
Membantu pelaku industri perangkat telekomunikasi dalam negeri untuk mendapat pengakuan kesesuaian teknis terhadap produk telekomunikasi yang dihasilkan. Pengakuan kesesuaian teknis tersebut diharapkan bisa diterima secara internasional dan dapat digunakan untuk mendukung ekspor produk yang dihasilkan. Indonesia belum menjadi pemain penting produsen perangkat TIK di dunia, hanya cenderung sebagai konsumen. Ini artinya BBPPT harus menjadi *Gate* bagi gerbang impor-ekspor perangkat TIK dan menumbuh-kembangkan industri perangkat TIK dalam negeri sampai bisa bersaing di tingkat global.
3. Bagian dari *Spectrum Management*:
Menjamin tidak terjadinya interferensi yang ditimbulkan karena alat/perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan. Banyaknya perangkat yang masuk atau beredar jika tidak diiringi dengan pemastian pemenuhan regulasi teknis tentunya akan mengganggu perangkat lain dan dapat menurunkan user experience layanan TIK. Ini artinya BBPPT harus menjadi bagian terintegrasi dari *Spectrum Management* frekuensi radio.

BBPPT berharap akan menjadi ikon laboratorium telekomunikasi di Indonesia, selain menyangkut fungsi balai uji kedepan, juga aspek hukum Kemkominfo sebagai penjamin kualitas produk telekomunikasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang pengujian dan kalibrasi alat dan perangkat telekomunikasi dapat terlaksana sehingga terwujudnya tata kelola pelayanan dan administrasi yang bersih, efisien dan efektif. Potensi kedepan BBPPT sebagai pusat pengujian perangkat TIK antara lain:

BBPPT menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK sebagai rujukan nasional bagi laboratorium uji lainnya di Indonesia yang memiliki kemampuan setara dengan *World Class Testing Laboratory* dan berdaya saing global.

BBPPT menjadi “Center of Excellence” pengujian perangkat TIK

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi di BBPPT antara lain:

1. BBPPT belum dapat melakukan beberapa parameter pengujian yang ada dalam regulasi teknis, hal ini dikarenakan keterbatasan tempat, alat ukur dan kompetensi personel.
2. Keterbatasan jangkauan penyampaian informasi kepada pelanggan terkait adanya perubahan prosedur persyaratan teknis pengujian.
3. Waktu penyelesaian pengujian masih dinilai relatif lama oleh pelanggan.
4. Faktor penyebab capaian PNPB tidak memenuhi target karena kebijakan regulasi yang berdampak pada target pencapaian.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

00

01

PENDAHULUAN

02

03

04





PERJANJIAN KINERJA

22 Rencana Strategis 2020 - 2024
23 Perjanjian Kinerja 2022

RENCANA STRATEGIS BBPPT

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi secara garis besar pada periode 5 tahun tersebut yaitu menitikberatkan pada pengembangan laboratorium BBPPT sebagai laboratorium rujukan dan laboratorium pusat pengujian perangkat TIK, dimana tergambar dalam tahapan Sasaran Strategis BBPPT pada tabel berikut ini:

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Program/ Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 01 - Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Dan Informatika							
IKK 1 Indeks integritas pelayanan publik pengujian perangkat TIK	%		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
IKK 2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengujian perangkat TIK	%		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Sasaran Kegiatan 03 - Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menjadi Pusat Pengujian Perangkat TIK							
IKK 3 Pengembangan laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi rujukan nasional	%		10	30	50	80	100
IKK 4 Persentase (%) pemenuhan standar mutu International Organization for Standardization (ISO))	%		20	40	60	80	100
IKK 5 Persentase (%) pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/ Perangkat Pengujian	%		N/A	50	-	90	100
Sasaran Kegiatan 04 - Meningkatkan Daya Saing Dan Penguatan Teknologi Pengujian Melalui Kerjasama Sesuai Standar Internasional							
IKK 6 Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi	%		95	95	95	95	95
IKK 7 Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur	%		95	95	95	95	95
IKK 8 Jumlah kerjasama yang terjalin dengan organisasi pengujian perangkat	Kerjasama		1	1	1	1	1

PERJANJIAN KINERJA BBPPT 2022

00

01

02

PERJANJIAN
KINERJA

03

04

Perjanjian kinerja BBPPT di tahun 2022 terdiri dari 4 sasaran strategis, 3 sasaran strategis dengan fokus pengembangan BBPPT dalam bidang pengujian perangkat telekomunikasi dan 1 sasaran strategis terkait dukungan teknis pada Nilai Kinerja Anggaran, berikut adalah Sasaran Strategis BBPPT :

1. Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK;
2. Meningkatkan Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian melalui Kerjasama Sesuai Standar Internasional ;
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT;
4. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif.

Indikator tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase (%) Pengembangan BBPPT sebagai Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK dengan target di tahun 2022 adalah sebesar 50% dan capaian target berupa 2 unit Konstruksi dan Sarana Pendukung;
2. Persentase (%) Pemenuhan Standar mutu *International Organization for Standardization* (ISO) dengan target 60% pada tahun 2022 dengan pengukuran capaian adanya penambahan 4 ruang lingkup ISO 17025, terakreditasi ISO 17043;
3. Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi ditargetkan sebesar 95% di tahun 2022 dengan pengukuran capaian jumlah Laporan Hasil Uji dibandingkan jumlah permohonan pengujian dikali 100% pada tahun berjalan;
4. Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur ditargetkan sebesar 95% pada tahun 2022 dengan pengukuran capaian jumlah Laporan Hasil Kalibrasi dibandingkan jumlah permohonan kalibrasi dikali 100% pada tahun berjalan;
5. Jumlah Kerjasama yang terjalin dengan Organisasi Pengujian Perangkat sebanyak 1 kerjasama dengan pengukuran capaian berupa dilaksanakannya/ditandatanganinya perjanjian kerjasama dengan laboratorium standar internasional;
6. Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10) target sebesar 8.20 pengukuran pencapaian sesuai dengan hasil survey Setditjen SDPPI;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4) target sebesar 3,5 pengukuran pencapaian sesuai dengan hasil survey Setditjen SDPPI;
8. Persentase (%) Pencapaian Target PNBPN Biaya Pengujian dan Kalibrasi dari target yang ditetapkan 100% dari nominal Penerimaan Rp.15.225.853.000;
9. Nilai Kinerja Anggaran BBPPT dengan target tahun 2022 sebesar 86 dimana nilai capaian diambil dari nilai IKPA (40%) + SMART (60%)



AKUNTABILITAS KINERJA

- 26 Capaian Kinerja Organisasi
- 47 Kinerja Lainnya
- 52 Langkah Strategis BBPPT



CAPAIAN KINERJA BBPPT

Akuntabilitas Kinerja BBPPT merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan “Program dan Kegiatan” yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi BBPPT. Misi tersebut diupayakan secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui bentuk sebuah laporan kinerja dalam periode setahun yaitu selama bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022, sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK	1. Presentase (%) pengembangan BBPPT sebagai laboratorium pusat pengujian perangkat TIK	50%	50%	100
	2. Persentase (%) Pemenuhan standar mutu <i>International Organization for Standardization</i> (ISO)	60%	60%	100
Meningkatnya Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian Melalui Kerjasama Sesuai Standar Internasional	1. Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi	95%	97,42%	102.54
	2. Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur	95%	97,27%	102.39
	3. Jumlah kerjasama yang terjalin dengan organisasi pengujian perangkat	1 Kerjasama	3 Kerjasama	300
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT	1. Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)	8.2	8.95	109.15
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4)	3.50	3.70	105.71
	3. Persentase (%) Pencapaian Target PNBPN Biaya Pengujian dan Kalibrasi dari target yang ditetapkan (Rp. 15.225.853.000)	100%	32.60%	32.60
Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif	1. Nilai Kinerja Anggaran BBPPT	87	83	95.40

Persentase (%) Pengembangan BBPPT Sebagai Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK	Persentase (%) pengembangan BBPPT sebagai laboratorium pusat pengujian perangkat TIK	50%	50%	100

Pembangunan gedung laboratorium BBPPT Tapos dengan bangunan seluas 11.953 m² pada lahan seluas 22,723 m² telah diselesaikan pada akhir Desember 2022 yang berada di Jl. Raya Tapos No.46, Kota Depok, Jawa Barat diawali dengan penyiapan dokumen perencanaan teknis pada tahun 2021 dengan capaian 100% dari target kumulatif pengembangan BBPPT sebesar 30%. Pada tahun 2022, diperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 641/4981/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2022. Dengan dilakukannya Konferensi Pers dan Peletakan Batu Pertama dalam rangka dimulainya Pembangunan Konstruksi Gedung laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate didampingi oleh Dirjen SDPPI, Kepala BBPPT Tony Tovik Hidayat, jajaran pimpinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, melakukan *groundbreaking* atau peletakan batu pertama secara simbolis dengan menekan layar. Menteri Johnny didampingi Dirjen SDPPI Ismail; Inspektur Jenderal, Dodi Setiadi; Direktur Utama PT PP Tbk Novel Arsyad; dan Walikota Depok Imam Budi Hartono pada tanggal 16 Maret 2022. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 dimulainya konstruksi fisik gedung laboratorium BBPPT Tapos beserta sarana prasarana berupa interior, *furniture* dan *artwork* dan telah diselesaikan pada akhir Desember 2022.

TAHAPAN PENGEMBANGAN GEDUNG BALAI PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI



Fase Persiapan
Perencanaan Teknis

2021

- Perizinan
- Perencanaan Teknis
- Manajemen Konstruksi



Fase Pembangunan
Fisik Gedung

2022

- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi
- Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi (Design & Build)



Fase Penyediaan
Fasilitas
Laboratorium

2023

- Fisik Chamber dan Shielded Room
- Alat Ukur
- Instrumen Laboratorium



Fase Mobilisasi dan
Integrasi

2024

- Sistem Informasi Laboratorium
- Mobilisasi Sumber Daya

Adapun gedung kantor dan fasilitas laboratorium dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan yang terdiri dari :

1. Gedung kantor terdiri dari 4 lantai, lantai 1 ruang pelayanan, lantai 2,3,dan 4 sebagai ruang perkantoran
2. Laboratorium terdiri dari 4 lantai, 5 laboratorium pengujian dan 1 laboratorium kalibrasi
3. Gudang terdiri dari 3 lantai
4. Gedung mess dan serba guna terdiri dari 3 lantai
5. Masjid
6. Fasilitas olahraga.

Kemudian Dirjen SDPPI selaku Unit Eselon I menyatakan bahwa BBPPT akan dilengkapi dengan 5 laboratorium untuk menguji perangkat telekomunikasi untuk menguji perangkat sehingga tidak terjadi gangguan satu perangkat dengan perangkat lainnya, dan frekuensi kerja perangkat telekomunikasi suatu perangkat tidak mengganggu dan menimbulkan interferensi kemudian menjaga keamanan dan Kesehatan masyarakat pengguna perangkat telekmunikasi yang benar-benar terjamin oleh pemerintah melalui pengujian *safety*. Di sampng itu diharapkan perangkat yang beredar di Indonesia memiliki tingkat TKDN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan pusat pengujian perangkat TIK di Tapos, Depok Jawa Barat pada tahun ini akan sampai ada tahap Tahun ke 3 dengan target 50 % pengembangan laboratorium BBPPT dan sarana pendukung, dimulainya dengan konstruksi gedung yang akan berdiri di atas lahan sebesar 22.723 m², dengan 5 bangunan yang berdesain futuristik dan ramah lingkungan.





00

01

02

03

AKUNTABILITAS
KINERJA

04



Persentase (%) Pemenuhan Standar Mutu *International Organization for Standardization (ISO)*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Terwujudnya Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK	Persentase (%) Pemenuhan standar mutu <i>International Organization for Standardization (ISO)</i>	60%	60%	100

Kaji Ulang Dokumen ISO 17025

Pada tahun 2021 dengan capaian 100% dari target Pemenuhan Standar Mutu ISO sebesar 40% dengan penambahan 4 ruang lingkup. Kegiatan Kaji Ulang Dokumen ISO 17025 merupakan rangkaian berkelanjutan untuk melaksanakan pembahasan dokumen sistem mutu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan hal-hal teknis lainnya yang bertujuan untuk peningkatan sistem mutu laboratorium secara konsisten. Pada tahun 2022 BBPPT telah melaksanakan serangkaian kegiatan terkait kaji ulang dokumen ISO 17025, antara lain:

Terlaksananya kaji ulang dokumen mutu ISO 17025 dari PM, PK, IK dan FR.

Pengisian Daftar Periksa Kesesuaian 17025, seperti memuat ketidakberpihakan, kerahasiaan, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya (peralatan, produk dan jasa eksternal), persyaratan proses, dan persyaratan sistem manajemen.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) memiliki peran melaksanakan pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi sebelum digunakan atau diedarkan sesuai dengan persyaratan teknis. Untuk menjaga sistem mutu serta memenuhi persyaratan teknis tersebut BBPPT sudah terakreditasi standar kompetensi laboratorium pengujian dan Kalibrasi yaitu ISO 17025. Dengan diperolehnya akreditasi tersebut, maka komitmen penjagaan mutu sesuai ISO 17025 harus ditingkatkan dan dikembangkan.

BBPPT telah melakukan peningkatan penjagaan mutu ISO 17025 selama tahun 2022 yang dilakukan dengan melaksanakan audit internal dan assesmen oleh KAN, hal ini dilakukan guna memastikan kualifikasi BBPPT sesuai dengan setiap standar yang ada di ISO 17025. Hasil dari setiap temuan baik audit internal maupun assesmen oleh KAN nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan peningkatan mutu di BBPPT agar sesuai dengan ISO 17025. Kemudian selama tahun 2022 juga telah dilakukan uji banding antar pengujian yang ada di BBPPT dan juga antar laboratorium pengujian dan kalibrasi lainnya yang ada di Indonesia.

Selain itu juga juga dilakukan kaji ulang Dokumen Mutu secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pemantauan dilakukan pada setiap hierarki Dokumen Mutu, mulai dari Panduan Mutu (PM), Prosedur Kerja (PK), Instruksi Kerja (IK), dan Format Rekaman (FR). Bagian yang dilakukan pemantauan meliputi kesesuaian dengan *guidance* ISO 17025, kesesuaian proses, kesesuaian istilah, dan keseragaman. Selama tahun 2022 sudah terdapat 4 versi Dokumen Mutu ISO 17025 hasil kaji ulang dokumen, yaitu:

1. v22.00.00.
2. v22.01.00.
3. v22.02.00.
4. v22.02.01.

Dalam peningkatan penjaminan mutu ISO 17025 selama tahun 2022 juga telah dilakukan uji banding antar pengujian yang ada di BBPPT dan juga antar laboratorium pengujian dan kalibrasi lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kualifikasi pengujian di BBPPT dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Kemudian dalam pengembangan mutu layanan di BBPPT agar menjadi laboratorium pengujian dan kalibrasi yang bertaraf internasional, juga dilakukan penambahan ruang lingkup pengujian, yang telah dilakukan asesmen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan telah diselesaikan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian dalam proses penambahan ruang lingkup pengujian. Berikut beberapa ruang lingkup yang ditambahkan kedalam akreditasi KAN, diantaranya:

1. DVB T2.
2. Radio Maritim.
3. Radio Modem.
4. OLT.
5. ONT.
6. IP PBX.
7. IP Phone.
8. DVB S.
9. *Electrical Safety*.
10. *Specific Absorption Rate*.

Sehingga pada tahun 2022 BBPPT telah memiliki 31 ruang lingkup pengujian terakreditasi oleh KAN.

Tinjauan Manajemen Uji Profisiensi 17043

Kegiatan Tinjauan Manajemen bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, kelangsungan dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu. Pada tahun 2022 BBPPT telah melaksanakan serangkaian kegiatan terkait tinjauan manajemen uji profisiensi 17043, antara lain:

1. Melakukan Kaji Ulang permintaan Uji Profisiensi untuk tahun 2022.
2. Melaksanakan Uji Profisiensi yang diikuti oleh 7 peserta yaitu BBPPT, TTH, SCI, HIT, Polines dan HCT.
3. Telah dilakukan assessment/audit eksternal ISO 17043 dari KAN.

BBPPT telah terakreditasi ISO 17043 tentang Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Penyelenggara Uji Profisiensi. Uji Profisiensi dilakukan guna meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme laboratorium serta menambah kepercayaan pelanggan laboratorium. Selain itu juga dapat menambah kemampuan dan kapasitas laboratorium secara nasional. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja laboratorium, memantau kinerja laboratorium secara berkelanjutan, dan sebagai evaluasi internal laboratorium yang bersangkutan. Selain itu juga kegiatan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan unjuk kerja metode pengujian.

Pada tahun 2022 BBPPT telah melakukan Uji Profisiensi pada fitur *Bluetooth* dan *Wireless LAN* dengan parameter Daya Pancar, Frekuensi Kerja (*Bluetooth*) dan Daya Pancar, *Occupied Bandwidth*, Frekuensi Kerja (*Wireless LAN*). Pemilihan fitur pengujian ini dilakukan dengan melibatkan calon peserta dalam penyelenggaraan Uji Profisiensi. Dalam pemilihan pesertanya juga terdapat mekanisme dan persyaratannya secara khusus, diantaranya:

1. Berasal dari laboratorium milik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya.
2. Mempunyai sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan skema Uji Profisiensi.
3. Mempunyai fasilitas laboratorium yang terkait dengan ruang lingkup. Alat ukur yang digunakan adalah *Spectrum Analyzer* dengan range minimal antara 100 MHz sampai dengan 1 GHz dan terkalibrasi serta tertelusur, sesuai dengan panduan mutu masing-masing peserta.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Uji Profisiensi BBPPT memastikan kesesuaian, kecukupan, kelangsungan dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17043. Pada tahun 2022 Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) BBPPT telah melaksanakan serangkaian kegiatan terkait uji profisiensi 17043 pada fitur WLAN dan *Bluetooth* yang diikuti oleh 7 peserta dengan rincian sebagai berikut:

1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)
2. Telkom Test House (TTH)
3. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)
4. Bureau Veritas Indonesia (BV)
5. Hyundai Calibration & Certification Technologies (HCT)
6. Hartono Istana Teknologi (HIT)
7. Politeknik Negeri Semarang (Polines)

Hasil dari evaluasi Uji Profisiensi juga dapat digunakan:

1. Sebagai dasar mempertahankan status akreditasi laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017 pada saat survailen atau reakreditasi.
2. Sebagai dasar mengajukan penambahan ruang lingkup laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017.



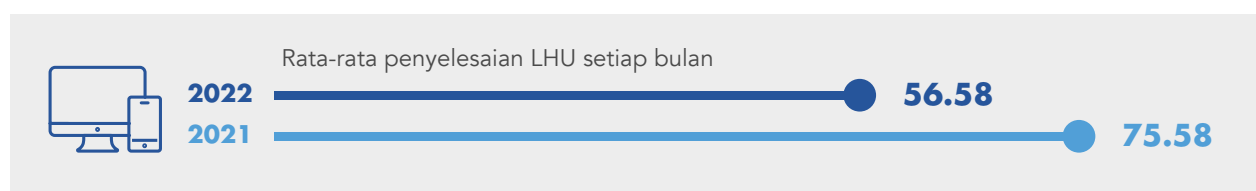
Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Meningkatnya Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian Melalui Kerjasama Sesuai Standar Internasional	Persentase (%) Penyelesaian Pengujian Perangkat Telekomunikasi	95%	97,42%	102.54

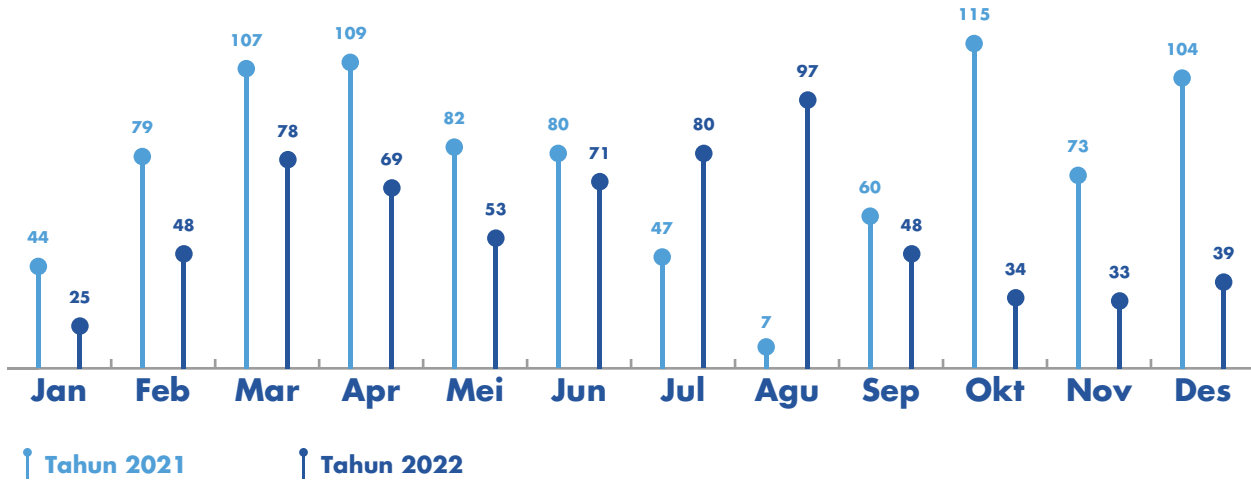
Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran. Persyaratan teknis tersebut merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, lingkungan, keselamatan/ keamanan, dan kesehatan. Apabila Menteri belum mengatur persyaratan teknis, pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dapat mengacu pada standar internasional atau standar lainnya.

BBPPT melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2017 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada spesifikasi teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (*Technical Specification Regulation*), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Bulan	Jumlah Permohonan Terbit	Jumlah LHU Selesai	Akumulasi Jumlah Permohonan	Akumulasi Jumlah LHU Selesai	Prosentase penyelesaian Pengujian (%)
Januari	62	25	62	25	40.32
Februari	43	48	105	73	69.52
Maret	90	78	195	151	77.44
April	85	69	280	220	78.57
Mei	41	53	321	273	85.05
Juni	86	72	407	345	84.77
Juli	93	80	500	425	85.00
Agustus	56	97	556	522	93.88
September	33	51	589	573	97.28
Oktober	33	34	622	607	97.59
Nopember	50	33	672	640	95.24
Desember	25	39	697	679	97.42



Jumlah permohonan yang masuk pada tahun 2022 adalah sebanyak 697 aplikasi. Hingga tanggal 31 Desember 2022 penyelesaian proses pengujian mencapai 679 aplikasi. Jumlah fitur yang paling banyak diuji adalah *Bluetooth*, *Router*, *Antenna Microwave* dan lainnya. Berikut ini merupakan dua puluh besar fitur yang paling banyak diuji pada tahun 2022.



No	Nama Fitur	Total Fitur Permohonan
1	Bluetooth	108
2	Router	99
3	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave/STL	68
4	Set Top Box Penerima Terrestrial	43
5	Multi Layer Switch	39
6	Faximile	36
7	Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (2.4 GHz)	35
8	Walkie Talkie	34
9	Digunakan untuk uji lapangan, status di non aktifkan. jangan diubah	30
10	Terminal VoIP / IP Phone	25
11	OLT (Optical Line Termination)	20
12	Conducted Electromagnet Interference	17
13	Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (5.8 GHz)	17
14	Perangkat Low Power (<10mW)	16
15	Optical Network Terminal (ONT)	15
16	Radar Surveillance	15
17	VSAT Upconverter	15
18	Modem Satelit	14
19	Wi-Fi / Wireless LAN Indoor	14
20	Optical Node Unit (ONU)	12

Keberhasilan pencapaian realisasi melebihi target yang ditetapkan karena adanya penambahan alat ukur dan evaluasi waktu penyelesaian pengujian menjadi 10 hari kerja. Pengujian yang telah diselesaikan pada tahun 2021 adalah sejumlah 907 Laporan Hasil Uji (LHU) dari 950 pengajuan permohonan.

Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Meningkatnya Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian Melalui Kerjasama Sesuai Standar Internasional	Persentase (%) Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur	95%	97,27%	102.39

BBPPT memiliki nomor akreditasi LP-112-IDN sebagai Laboratorium Pengujian dan nomor akreditasi LK-137-IDN sebagai Laboratorium Kalibrasi yang artinya BBPPT telah melaksanakan kegiatan operasional laboratorium yang sesuai standar Internasional ISO 17025:2017. Hal ini juga berarti bahwa pengujian alat perangkat TIK dan kalibrasi alat ukur yang dilaksanakan BBPPT telah diakui secara internasional. Untuk itu, agar pengakuan ini dapat dipertahankan, maka BBPPT harus menjaga dan meningkatkan mutu pengujian dan kalibrasinya dengan melaksanakan kaidah-kaidah yang terdapat pada ISO 17025:2017

Sertifikat kalibrasi adalah surat keterangan (pernyataan) yang tertulis atau terletak dari lembaga laboratorium kalibrasi yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti keabsahan dari serangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur atau material ukur dengan membandingkan alat ukur atau material ukur tersebut dengan suatu standar / reference/kalibrator yang mampu tertelusur (*traceable*) ke kesatuan nasional atau satuan internasional.

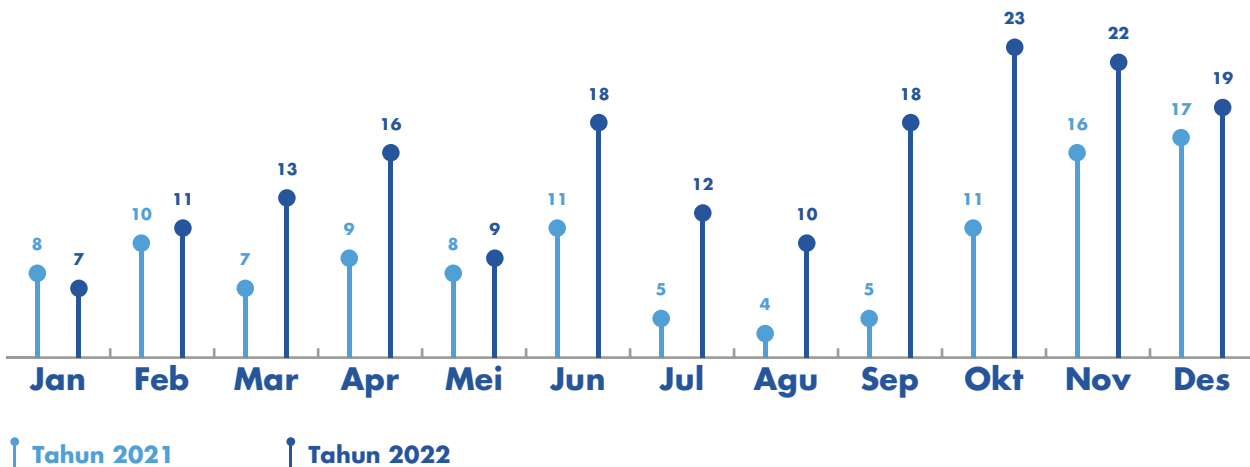
Target presentase (%) penyelesaian kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi, capaian yang diperoleh oleh BBPPT dalam presentase (%) penyelesaian kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi jumlah kalibrasi sebanyak 117 pemohon. Kalibrasi internal 53 kalibrasi UPT berjumlah 54 dan dari swasta 10 pemohon dengan presentase capaian.

Kalibrasi alat ukur memiliki dua tujuan yaitu untuk memeriksa keakuratan instrumen dan menentukan ketertelusuran pengukuran. Dalam prakteknya, kalibrasi juga mencakup perbaikan perangkat jika berada di luar kalibrasi. Sebuah laporan diberikan oleh ahli kalibrasi, yang menunjukkan kesalahan pengukuran dengan alat ukur sebelum dan sesudah kalibrasi.

BBPPT dalam melaksanakan proses kalibrasi dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LK-137-IDN.

Jumlah permohonan kalibrasi pada tahun 2022 yang masuk ke BBPPT adalah 170 aplikasi. Sedangkan jumlah kalibrasi yang telah selesai dilakukan sebanyak 160 aplikasi. Total 161 aplikasi merupakan kalibrasi internal dan 9 aplikasi merupakan aplikasi dari pihak swasta atau pemerintahan.

Bulan	Jumlah Permohonan Terbit	Jumlah LDK Selesai	Akumulasi Jumlah Permohonan	Akumulasi Jumlah LDK Selesai	Prosentase penyelesaian Kalibrasi (%)
Januari	17	7	17	7	41.18
Februari	7	11	24	18	75.00
Maret	15	13	39	31	79.49
April	13	16	52	47	90.38
Mei	14	9	66	56	84.85
Juni	13	18	79	74	93.67
Juli	12	12	91	86	94.51
Agustus	18	10	109	96	88.07
September	17	18	126	114	90.48
Oktober	19	23	145	137	94.48
Nopember	22	22	167	159	95.21
Desember	16	19	183	178	97.27



Kalibrasi di BBPPT dapat dilakukan secara reguler di laboratorium maupun *on site calibration*, yang dilaksanakan di lokasi perangkat tersebut di-setting/diinstal. Keberhasilan pencapaian realisasi melebihi target yang ditetapkan karena adanya kebijakan 0 rupiah pada pengajuan kalibrasi alat ukur untuk UPT Balai Monitoring di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pelaksanaan *On-site test* kalibrasi.

Pengujian yang telah diselesaikan pada tahun 2021 adalah sejumlah 116 Laporan Hasil Kalibrasi (LHK) dari 111 pengajuan permohonan.



Jumlah Kerjasama yang terjalin dengan Organisasi Pengujian Perangkat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Meningkatnya Daya Saing dan Penguatan Teknologi Pengujian Melalui Kerjasama Sesuai Standar Internasional	Jumlah kerjasama yang terjalin dengan organisasi pengujian perangkat	1 Kerjasama	3 Kerjasama	300

Uji Banding Laboratorium Pengujian

Uji banding merupakan kegiatan evaluasi pengujian atas bahan yang sama atau serupa oleh dua atau lebih laboratorium yang berbeda sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan dilaksanakannya uji banding ini adalah untuk mengetahui performa dari BBPPT dan memberikan jaminan mutu terhadap hasil pengujian, bahwa hasil pengujian telah sesuai dengan standard teknis yang berlaku. Pada tahun 2022 BBPPT melaksanakan serangkaian kegiatan terkait uji banding antar laboratorium yaitu melaksanakan uji banding fitur Stasiun Bumi Satelit, fitur LPWA, fitur *Bluetooth*, fitur WLAN, dan fitur SS 5G antar 6 laboratorium yaitu, BBPPT, TTH, SCI, HIT, BV dan HCT.

Capaian pelaksanaan kegiatan uji banding pada tahun 2021 adalah terlaksana pada 7 fitur pengujian yaitu IP PBX, IP Phone, OLT, ONT, Radio Maritim, Radio Modem dan DVBT2 dengan peserta antar 10 laboratorium yaitu BBPPT, B4T, TTH, Sucofindo, HIT, BV, Qualis, BSPJI, HCT dan BERCA.

Kerja Sama

BBPPT sebagai salah satu laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi milik pemerintah memiliki peran untuk mendorong peningkatan industri telekomunikasi di Indonesia dengan cara menjalin kerja sama antara laboratorium. Pada tahun 2022 BBPPT melaksanakan serangkaian kegiatan terkait kerja sama bidang teknis antara laboratorium pengujian dalam negeri dan luar negeri, antara lain:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BBPPT dengan Polines dan PT Qualis Indonesia;
2. Pembahasan PKS antara BBPPT dengan Telkom Test House (TTH), Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya (BSPJI) Kementerian Perindustrian; serta
3. Pembahasan lanjutan PKS antara BBPPT dengan PT. Sucofindo Persero.

PKS dengan pihak Polines berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 22 April 2022 dan mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
2. Pendampingan akreditasi SNI ISO/IEC:2017
3. Pelaksanaan program *internship* untuk para mahasiswa dan dosen dengan jangka waktu 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan
4. Penyediaan narasumber pelatihan, workshop, seminar dan *sharing session*

PKS dengan pihak PT Qualis Indonesia berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 3 Juni 2022 dan mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
2. Uji banding pengujian perangkat telekomunikasi dan kalibrasi alat ukur antar laboratorium
3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengujian perangkat telekomunikasi
4. Peningkatan dalam sistem mutu dan kualitas pelayanan pengujian
5. Identifikasi standar pengujian dan penyusunan rekomendasi metode pengujian
6. Ruang lingkup lain yang disepakati oleh para pihak

PKS dengan pihak BSPJI berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 17 November 2022 dan mempunyai ruang lingkup sebagai berikut pelaksanaan uji banding pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;

1. Pelaksanaan uji banding pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
2. Identifikasi standar pengujian dan penyusunan rekomendasi metode pengujian;
3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
4. Ruang lingkup lain yang disepakati oleh para pihak.

Sedangkan untuk PKS antara BBPPT dengan pihak TTH dan B4T, sedang dilakukan penyusunan draf PKS. Untuk PKS dengan pihak luar negeri, pada tanggal 23 Mei 2022 telah dilakukan kunjungan pendahuluan oleh pihak Communication Conformity Assessment Centre dari Korea untuk menjalin kerja sama dengan BBPPT dalam program World Friends Korea (WFK), namun belum dilakukan pertemuan lebih lanjut untuk membahas isi dan penandatanganan PKS antara kedua pihak.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan PKS antara BBPPT dengan B4T.



Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT	Indeks Integritas Pelayanan Publik (skala 0 s.d 10)	8.2	8.95	109.15

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) memperlihatkan gambaran besaran tingkat konsistensi pejabat/ petugas unit layanan publik di BBPPT dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, prosedur dan kode etik unit layanan berdasarkan parameter yang dikeluarkan oleh KPK. IIPP dilakukan pengukuran dengan melibatkan tiga pihak yaitu:

1. Pihak eksternal yang merupakan pengguna layanan;
2. Pihak internal atau pegawai BBPPT; dan
3. Pakar yaitu orang-orang yang memahami layanan publik di BBPPT.

Penilaian IIPP oleh pihak eksternal langsung berkaitan dengan BBPPT dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam hal transparansi, sistem antikorupsi dan integritas pegawai. Pengguna layanan akan menilai pegawai BBPPT apakah pegawai sudah memberikan pelayanan secara berintegritas.

Pihak internal atau pegawai BBPPT juga diberi kesempatan untuk menilai secara internal terkait dengan pelaksanaan integritas pelayanan publik. Beberapa hal yang dinilai oleh pegawai antara lain budaya organisasi, sistem antikorupsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran. Penilaian internal akan memberikan gambaran bahwa BBPPT sudah membuat sistem pencegahan dan penerapan antikorupsi di instansi tersebut.

Pihak pakar memberikan penilaian terkait dengan transparansi dan sistem anti korupsi berdasarkan pengamatan mereka. Penilaian IIPP unit layanan BBPPT mengacu pada standar integritas yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dengan besaran rentang nilai IIPP adalah skala 1-4 dan skala 1-10. Pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pengujian alat dan perangkat telekomunikasi terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu "Transparansi", "Sistem Anti Korupsi" dan "Integritas Pegawai".

No	Indikator	Skala 1-4	Skala 1-10
1	Transparansi	3,61	8,84
2	Sistem Anti Korupsi	3,64	8,92
3	Integritas Pegawai	3,69	9,08
Nilai IIPP Layanan Penugjian		3,65	8,95

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebesar 3,65 (skala ukur 1-4) atau 8,95 (skala ukur 1-10). Angka IIPP ini sudah berada di atas standar minimum indeks integritas pelayanan publik yang ditetapkan KPK, yaitu sebesar 6,00 (skala ukur 1-10) artinya pelayanan publik Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) sudah berintegritas dalam melayani masyarakat pengguna layanan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. Semua indikator sudah berada di atas nilai 6,00 sehingga hal tersebut sudah sangat bagus. Indikator yang menghasilkan nilai IIPP terbesar yaitu "Integritas Pegawai" dengan nilai IIPP sebesar 9,08; sedangkan yang mendapatkan penilaian terendah adalah indikator "Transparansi" dengan nilai 8,84. Nilai IIPP pada tahun 2021 telah tercapai dengan nilai sebesar 8,91 dari target 8,20.

Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT	Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 0 s.d 4)	3.50	3.70	105.71

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperlihatkan gambaran tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKM dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal yang merupakan pengguna layanan. Penilaian IKM berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sasaran penilaian IKM ini adalah:

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
- Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017, ruang lingkup Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
2. Persyaratan.
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Biaya/tarif.
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
4. Waktu Layanan.
Waktu layanan adalah waktu yang disediakan bagi pengguna layanan untuk mengurus layanan.
5. Waktu penyelesaian layanan.
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
6. Respons Aplikasi.
Respons Aplikasi adalah kemampuan aplikasi layanan yang harus dimiliki penyedia layanan publik.
7. Performa.
Performa adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana dan prasarana.
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. Penanganan pengaduan.
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Jumlah responden yang berhasil disurvei adalah sebanyak 142 orang yang terdiri dari:

- Kelompok 1, pengguna layanan BBPPT yang hanya mengajukan permohonan pengujian 1 kali, sebanyak 9 orang.
- Kelompok 2, pengguna layanan BBPPT yang mengajukan permohonan pengujian 2 atau 3 kali, sebanyak 19 orang.
- Kelompok 3, pengguna layanan BBPPT yang mengajukan permohonan 4 kali atau lebih, sebanyak 114 orang.

Nilai IKM pada tahun 2021 telah tercapai dengan nilai sebesar 3,6 dari target 3,5, dan hasil pengolahan data survei tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas penyelenggaraan layanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada tahun 2022 di BBPPT disajikan pada tabel berikut ini.

No	Indikator	Skala 1-4	Skala 1-10	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit
1	Persyaratan	3,68	92,12	A	Sangat Baik
2	Prosedur Layanan	3,70	92,53	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian Layanan	3,65	91,33	A	Sangat Baik
4	Kemudahan Pembayaran Tarif/Biaya	3,86	96,51	A	Sangat Baik
5	Produk Hasil Pelayanan	3,78	94,55	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,72	93,12	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,85	96,25	A	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,32	83,03	B	Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,71	92,67	A	Sangat Baik
IKM Layanan Pengujian		3,70	92,50	A	Sangat Baik

Secara keseluruhan responden yang disurvei pada Tahun 2022 menghasilkan IKM BBPPT atas penyelenggaraan layanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebesar 3,70 (dalam skala 1-4) atau 92,50 (dalam skala 1-100). Indeks ini sudah masuk dalam kategori "Sangat Baik" dengan mutu pelayanan A (nilai berada antara 88,31 – 100,00), artinya layanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi di BBPPT sudah sangat baik, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di BBPPT. Penilaian "Sangat Baik" ini berdasarkan tabel interpretasi IKM Pengguna Layanan BBPPT.

IKM yang sudah sangat baik ini juga tercermin pada 9 (sembilan) nilai indikator yang membangun IKM. Delapan dari sembilan nilai indikator pembangun IKM sudah berada di atas nilai 88,31 (ambang batas bawah untuk kategori sangat baik). satu-satunya indikator yang masih berada di bawah nilai 88,31 adalah indikator "Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan". BBPPT sebagai penyelenggara layanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi menyediakan layanan pengaduan melalui:

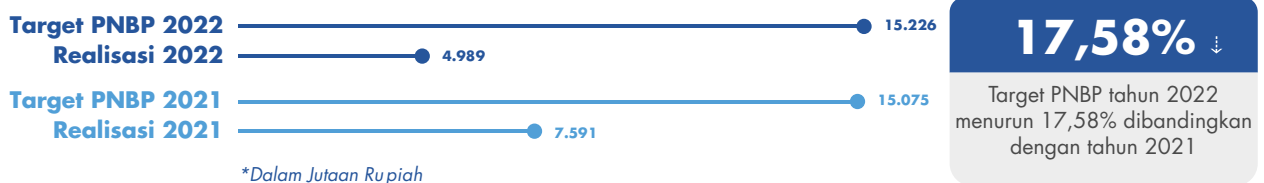
Call Center : 021-86615492 _ 95 (hunting)
 Call Center : 159 (SDPPI)
 Whatsapp : 0812 5000 0586
 Surel : pelayanan.bbppt@kominform.go.id
 Website : bbppt.postel.go.id
 Loket : Alamat kantor BBPPT
 Surat : Alamat kantor BBPPT

Seluruh pengaduan, saran dan masukan dari kanal-kanal tersebut sudah diselesaikan. Namun pengguna layanan masih belum terpuaskan. BBPPT akan terus mengevaluasi dan memperbaiki seluruh kinerja pelayanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi sehingga dapat memberikan layanan yang prima.

Persentase (%) Pencapaian Target PNBP Biaya Pengujian dan Kalibrasi dari Target yang ditetapkan (Rp. 15.225.853.000)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika BBPPT	Persentase (%) Pencapaian Target PNBP Biaya Pengujian dan Kalibrasi dari target yang ditetapkan (Rp. 15.225.853.000)	100%	32.60%	32.60

Faktor penyebab capaian PNBP tidak memenuhi target adalah faktor kebijakan uji dokumen maupun pembangunan balai uji baru, sehingga minat aplikasi lebih tinggi untuk mengajukan permohonan ke laboratorium lain. Hal ini menjadi indikator kekurangan laboratorium pengujian di BBPPT karena hanya dapat menguji EMC conducted. Masih tingginya tarif *electrical safety* dibandingkan dengan laboratorium lain.



Nilai Kinerja Anggaran BBPPT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian	Persentase
Terwujudnya Tata Kelola Administrasi BBPPT yang Efisien dan Efektif	Nilai Kinerja Anggaran BBPPT	87	83	95.40

Untuk mewujudkan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang maksimal, tata kelola administrasi yang efisien dan efektif menjadi langkah tak terpisahkan yang senantiasa dibangun oleh BBPPT.

Tata kelola administrasi yang efisien dan efektif ditunjang oleh banyak faktor, di antaranya adalah Nilai Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) dan realisasi anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendara Umum Negara, untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2022 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA dengan mengubah paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya berfokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output yang mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kemudian diwujudkan dalam bentuk reformulasi IKPA TA 2022.

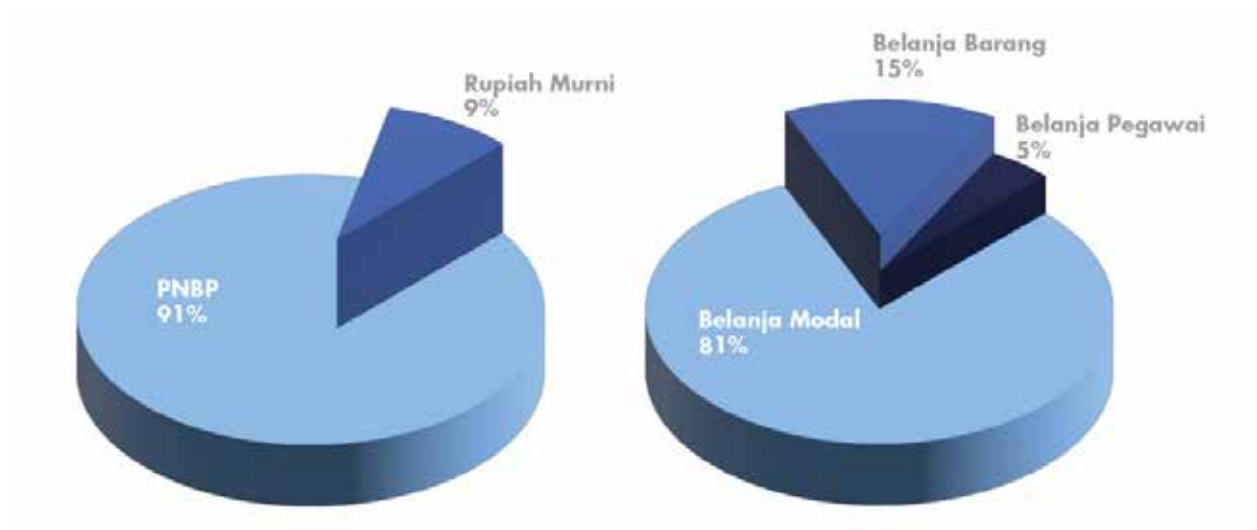
Reformulasi IKPA TA 2022 mengubah total indikator yang tadinya berjumlah 11, menjadi 8 indikator utama yang menunjang nilai total capaian IKPA. Sementara untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan memfasilitasi seluruh K/L melalui aplikasi SMART. IKPA dan SMART menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja anggaran setiap K/L maupun satuan kerja. Merujuk dari Perjanjian Kinerja Kepala BBPPT, demi terwujudnya tata kelola administrasi BBPPT yang efisien dan efektif, BBPPT memiliki target capaian Nilai Kinerja Anggaran sebesar 87, yang mana nilai capaian ini diambil dari nilai IKPA (40%) + SMART (60%).

Dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), realisasi penyerapan anggaran dan capaian output merupakan salah satu indikator yang memiliki bobot paling besar dalam menunjang nilai akhir IKPA. Realisasi anggaran menggambarkan penyerapan yang telah dilakukan oleh satuan kerja, sementara capaian output menilai kualitas dari hasil pelaksanaan anggaran. Terlebih lagi, pada tahun 2022, BBPPT dipercaya untuk mengemban salah satu Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Pengembangan Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK.

Untuk merealisasikan Rencana Strategis tersebut, BBPPT menerima pagu anggaran 2022 yang lebih besar jika dibandingkan dengan pagu anggaran 2018-2021, seperti tertera dalam Tabel berikut.

Sumber Pagu Anggaran	Jumlah
Rupiah Murni	20,323,106,000.00
PNBP	210,742,364,000.00
Jumlah	231,065,470,000.00

Pagu Anggaran	Jumlah
Belanja Pegawai	10,245,131,000.00
Belanja Barang	33,521,188,000.00
Belanja Modal	187,299,151,000.00
Jumlah	231,065,470,000.00



Tidak tercapainya target nilai 87 karena terdapat deviasi antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Dengan capaian 2021 adalah sebesar 93,24 dari target nilai sebesar 86

Realisasi Anggaran Dalam Jutaan Rupiah



Dukungan UMKM Pengujian TV Digital di Solo

Kementerian Perindustrian meminta pendampingan terhadap dua IKM (Industri Kecil dan Menengah) di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dilakukan untuk menyikapi program pemerintah ASO (*Analog Switch Off*). Kedua IKM ini memproduksi TV digital dengan harga terjangkau.

Pada tanggal 21 Oktober 2022 BBPPT melakukan kunjungan ke industri rumahan milik kedua IKM. Dilaksanakan kegiatan bimbingan langsung ke pabrikan industri tersebut dalam rangka memberikan Bimbingan Teknis dan mempelajari/memverifikasi/memvalidasi kesiapan perangkat TV Digital tersebut (Ujicoba – lapangan) fitur apa saja yang terdapat pada perangkat TV Digital dimaksud, juga untuk mempelajari kesiapan perangkat dapat diinstal *software/aplikasi* EWS.

IKM yang akan menjadi objek Bimbingan Teknis tersebut adalah :

1. CV Dygta Tama Elektronika
Lokasi: Jl. Kencur no. 17, Krawasan, Grogol, Sukoharjo.
2. CV Deva Elektronik
Lokasi: Jl. Sambeng No.6C , Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Surakarta

Alat ukur dan sarana pendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis adalah sebagai berikut:

- *Compact Modulator* (SFCU);
- TV LED;
- *Accessories*

Untuk melakukan demo pengujian perangkat Penerima siaran TV Digital DVBT2 dan EWS dan membantu IKM CV Dygta dan Deva Elctronic yang merupakan IKM yang bergerak di bidang Industri perakitan pesawat televisi yang sebelumnya hanya berbasis analog akan beralih menjadi pesawat televisi yang dapat menerima sinyal digital walaupun secara fisik televisi yang mereka produksi masih berupa televisi tabung (CRT) dan LCD. Dalam proses digitalisasi ini tentunya mereka membutuhkan legalitas terhadap produk mereka yang telah siap digital yaitu berupa sertifikasi perangkat yang menyatakan bahwa perangkat televisi buatan mereka telah *ready to digital*.

Kementerian Perindustrian yaitu Direktorat IKMA khususnya tergerak untuk memberikan bantuan kepada mereka yaitu dengan memberikan bimbingan kepada IKM-IKM tersebut untuk dapat memudahkan mereka dalam mendapatkan syarat syarat yang dibutuhkan dalam memperoleh ijin dan sertifikat pengujian perangkat yaitu : SNI dan TKDN dari Kemenperin , pengujian perangkat dan sertifikat pengujian perangkat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Direktorat Standardisasi dan BBPPT merupakan instansi yang berwenang dalam proses penerbitan sertifikat pengujian perangkat telekomunikasi. Maka Direktorat IKMA Kemenperin meminta kedua instansi tersebut untuk melakukan pendampingan dalam proses pengujian dan sertifikasi terhadap perangkat televisi milik IKM CV Dygta dan Deva Electronic. Acara pendampingan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 dengan Kunjungan terhadap dua IKM tersebut. Kunjungan pertama dilakukan pada IKM CV Dygta di Sukoharjo dan dilakukan diskusi bersama antara Kementerian Perindustrian, Direktorat Standardisasi, BBPPT dengan Giyanto selaku pemilik CV Dygta beserta Staf.

Direktorat Standarisasi memberikan panduan tentang tatacara untuk *submit* ke OSS untuk mendapatkan PLG ID dan BBPPT melakukan pendampingan tentang regulasi pengujian perangkat TV digital serta demo Pengujian RF TV digital dan EWS. Dilakukan pula *trial* pengujian terhadap pesawat televisi milik IKM CV

Dygta , dari situlah di ketahui bahwa televisi mereka telah dapat menerima siaran TV digital dengan baik dan dapat menerima sinyanya EWS. Pada pengujian EWS ditemukan banyak kekurangan dan ketidaksesuaian tampilan TV dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.3 tahun 2014. Item-item ketidaksesuaian tersebut terlampir.

Hasil dari pertemuan tersebut maka IKM CV Dygta diharuskan untuk dapat memperbaiki ketidaksesuaian yang ada pada tampilan EWS nya, BBPPT memberikan transport stream dan prosedur tes EWS untuk membantu perbaikan tersebut. CV Dygta diharapkan dapat koordinasi dengan *vendor chipset*-nya untuk melakukan perbaikan terhadap tampilan sinyal EWS.

Dilakukan pula diskusi dengan perihal yang sama dengan di lokasi CV Dygta. Dilakukan pula *trial* pengujian RF DVBT2 dan EWS rumah Gyatno selaku pemilik Deva Elektronik. Hasil diskusi kedua ini juga menghasilkan perihal yang sama dengan CV Dygta yaitu tentang tatacara pendaftaran OSS dan mendapatkan PLG ID serta proses mendaftar pengujian ke BBPPT hingga mendapatkan APL ID. Tampilan EWS pada perangkat televisi juga masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.3 tahun 2014.



Penghargaan Reformasi Birokrasi

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) berhasil membuktikan komitmen dalam menerapkan reformasi birokrasi yang sehat dan bersih di wilayah kerja. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan atas prestasi terkait implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 s.d 2022 di lingkungan Kementerian Kominfo.

BBPPT meraih penghargaan atas Pengelolaan BMN Terbaik Pagu di atas 30 Miliar (Penghargaan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat) dan penghargaan atas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020 (Penghargaan Kementerian PANRB).

Prestasi penghargaan pengelolaan BMN ini diraih dengan memperhatikan kriteria atas capaian Penetapan Status Penggunaan (PSP), capaian penghapusan, ketepatan waktu dan kualitas usulan RKBMN, transaksi koreksi pencatatan, dan pendapatan PNPB terkait dengan pemanfaatan aset non-tusi. Selain itu, pengelolaan BMN juga merupakan kinerja yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara secara baik, mengingat bahwa pengelolaan BMN diperoleh melalui pengelolaan keuangan negara yang baik pula.

Sementara penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), merupakan apresiasi atas komitmen BBPPT untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di wilayah kerja BBPPT. WBK merupakan salah satu langkah awal dalam melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis.

Atas diraihnya prestasi ini, diharapkan menjadi inspirasi dan dorongan bagi internal BBPPT khususnya dan seluruh sivitas Kementerian Kominfo pada umumnya untuk senantiasa melakukan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan BMN dan Wilayah Bebas dari Korupsi demi terciptanya pelayanan publik yang prima.



Uji Coba (EWS) Early Warning System

BBPPT sebagai salah satu unit kerja yang berada di Kementerian Kominfo menjadi salah satu peserta dalam pelaksanaan uji coba Implementasi EWS dalam sistem penyiaran TV digital ini. Dengan dipimpin oleh Direktorat Pita lebar ditjen PPI Kominfo, BBPPT bersama para vendor *Set Top Box* dan televisi penerima siaran digital DVBT2 serta LPS sebagai Penyelenggara MUX melakukan uji coba implementasi sistem peringatan dini bencana alam / EWS di beberapa daerah di Indonesia.

Uji coba EWS telah dilaksanakan sejak tahun 2021 sebanyak tiga kali. Pada tahun 2022 kembali dilakukan uji coba EWS sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Uji coba penyeragaman proses dan tampilan pada televisi. Dilaksanakan di Bogor pada tanggal 28-29 Januari 2022.
2. Uji coba tahap finalisasi dengan beberapa skenario yang dilaksanakan di Semarang pada tanggal 17 Februari 2022.
3. Uji coba aplikasi EWS TV Digital & Set Top Box melalui penyelenggara multipleksing siaran tv digital di Bali tanggal 15 Agustus 2022.
4. Uji coba aplikasi EWS TV Digital & Set Top Box melalui penyelenggara multipleksing siaran tv digital dengan beberapa skenario yang cukup kompleks. Dilaksanakan di Bali pada tanggal 1 Desember 2022.

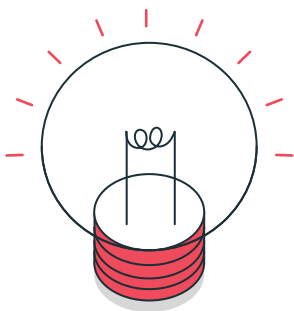
Seluruh uji coba berhasil dilakukan dengan kualitas hasil yang semakin baik. Untuk tahun depan akan uji coba masih akan dilakukan dengan fokus melibatkan pihak otoritas bencana sebagai *user* yang akan menjalankan sistem EWS.



LANGKAH STRATEGIS BBPPT

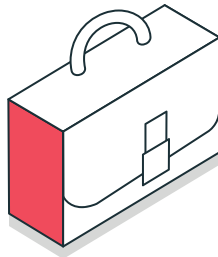
Langkah Strategis BBPPT

Dalam rangka meningkatkan peran dan kemampuan guna menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK dengan standar global BBPPT



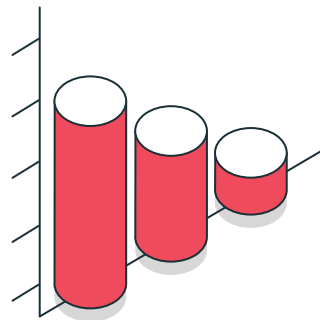
1

MENINGKATKAN SARANA
BERUPA ALAT UKUR DAN RUANG
LINGKUP PENGUJIAN DAN
KALIBRASI



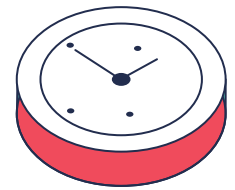
2

MEMASTIKAN SELURUH SISTEM
INFORMASI PENGUJIAN DAN
KALIBRASI MENJADI
TERINTEGRASI DAN
OTOMATISASI



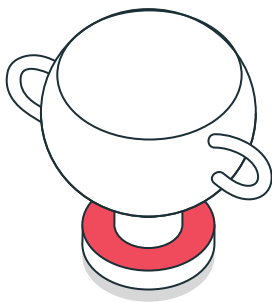
3

MENJALIN KERJA SAMA TEKNIS
DENGAN BERBAGAI
LABORATORIUM DI LUAR NEGERI
DI TINGKAT GLOBAL



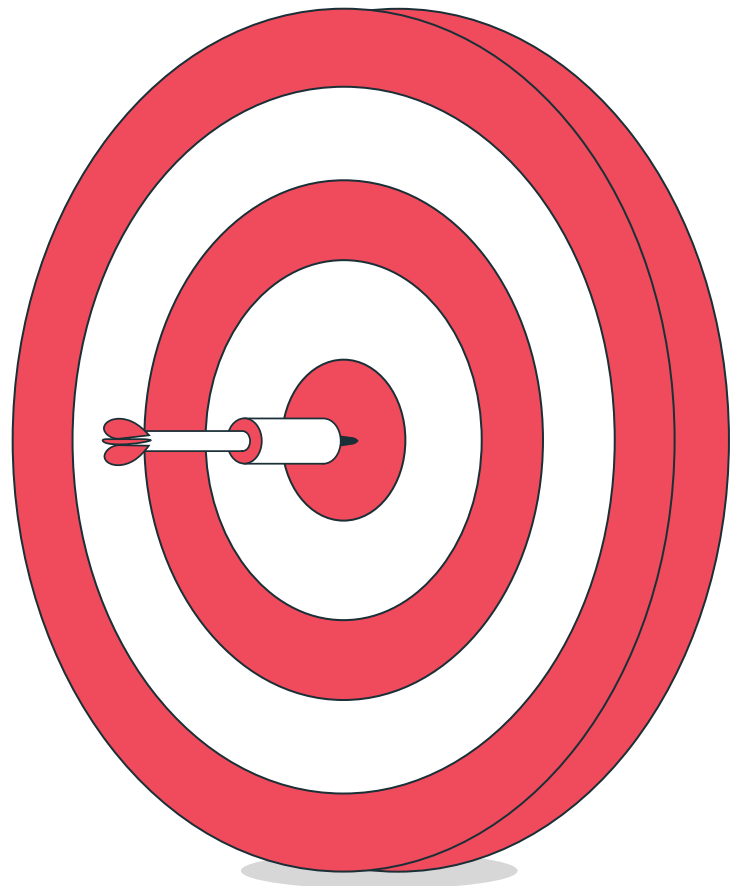
4

MENINGKATKAN KOMPETENSI
PEGAWAI MELALUI PELATIHAN
DALAM DAN LUAR NEGERI



5

MEMASTIKAN PENINGKATAN
MUTU HASIL PENGUJIAN YANG
DIKELUARKAN OLEH BBPPT
DAPAT DI TERIMA DAN DIAKUI
SECARA INTERNASIONAL OLEH
NEGARA LAIN



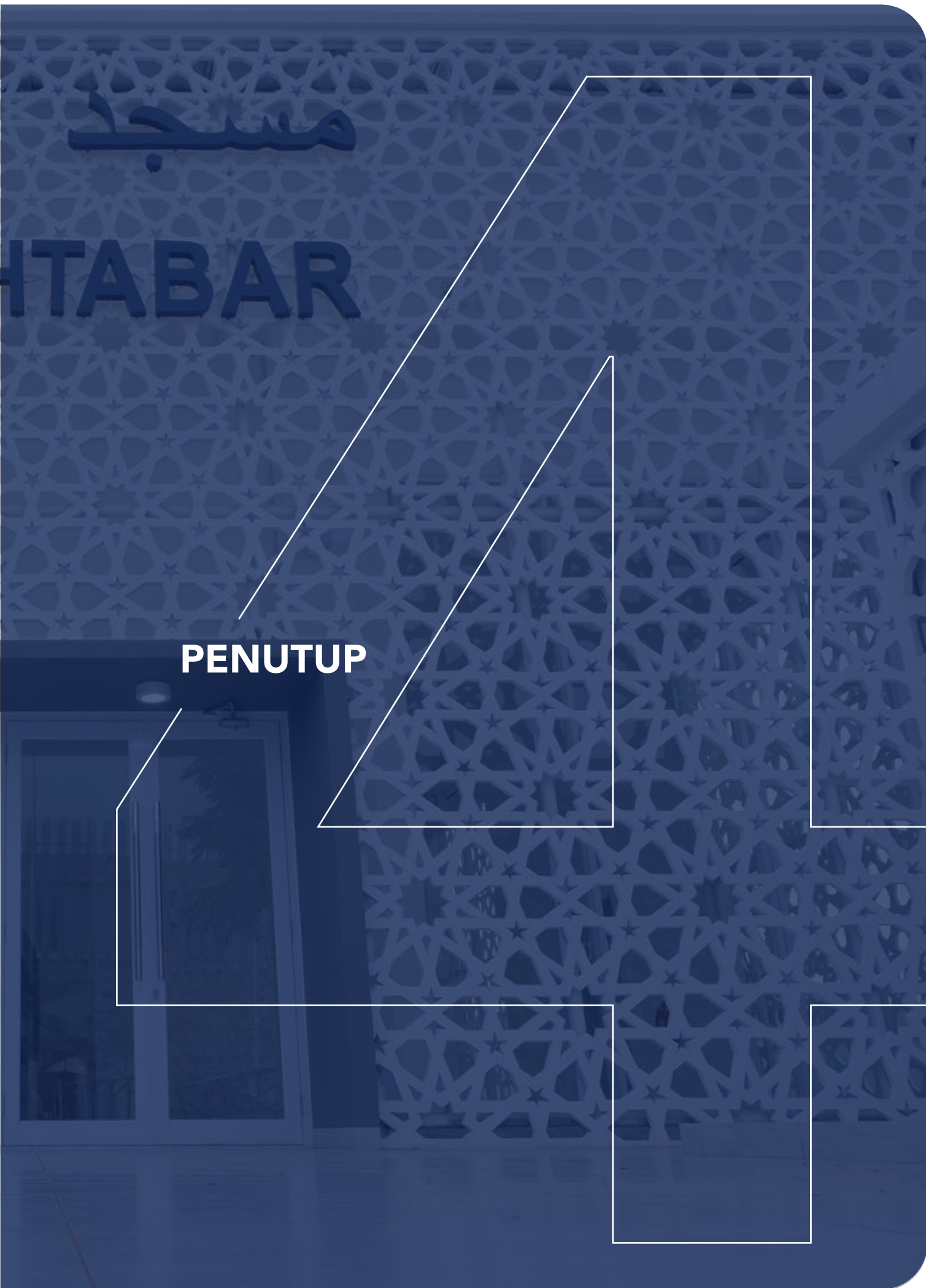
Laboratorium Pusat
Penguji Perangkat
TIK dengan standar
global



المختبر

AL-MUKH





مسجد

ITABAR

PENUTUP

PENUTUP

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai lembaga pengujian perangkat telekomunikasi yang dimiliki pemerintah khususnya dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berkembang mengikuti arah kebijakan dan perkembangan teknologi TIK, disamping itu BBPPT turut mendukung kebijakan Transformasi Digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo berprinsip *"connecting the unconnected band leaving no-one behind"* serta kemandirian dan kedaulatan digital. Dengan adanya kebijakan tersebut mau tidak mau masyarakat Indonesia akan mengikuti perkembangan teknologi, pengguna perangkat TIK akan semakin meningkat banyak dan semakin meningkat jenisnya, disinilah peran BBPPT sebagai lembaga laboratorium di bawah unit Ditjen SDPPI memfilter perangkat yang memang layak di pasarkan di Indonesia demi menjaga dan melindungi konsumen pengguna perangkat telekomunikasi sehingga dapat digunakan dengan aman.

Ke depannya BBPPT akan menjadi pusat pengujian perangkat TIK bagi semua produsen baik di dalam negeri, produk luar negeri yang diimpor wajib bersertifikasi dengan standar mutu internasional yang telah ditetapkan sesuai ISO 17025 dan sesuai pemenuhan regulasi teknis yang berlaku di Indonesia.

Pentingnya peningkatan SDM yang berkualitas serta fasilitas pemenuhan laboratorium *full compliance* dibutuhkan untuk mendukung perkembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, perkembangan akan terus dinamis mengikuti perkembangan teknologi di dunia.

Dukungan BBPPT terhadap kebijakan Transformasi Digital tersebut, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja khususnya pada industri-industri lokal perangkat telekomunikasi. Demikian Laporan Kinerja ini dibuat, diharapkan kinerja BBPPT dalam tahun ke tahun dapat terus meningkat dan terus berinovasi dan selalu terbuka terhadap perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi.



KOMINFO

SDPFI



Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Jl. Bintara Raya No.17
Bekasi Barat 17134

SDPFI
Parks Mobil
Parks Motor
Laboratorium
Gudang &
Bangkai Mural
Masjid
Mess &
Gedung Serbaguna
Lap. Olahraga